

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi daerah (Month to Month)

Wilayah	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III		
	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
Kab. Hulu Sungai Utara	4,05%	-2,21%	4,21%	1,75%	-4,40	-2,27%	-1,91%	-2,58	-0,55%
Prov. Kalsel	0,55%	-0,01%	0,62%	0,71%	-0,32%	-0,44%	-0,44%	-0,36%	0,07%
Nasional	2,57%	2,75%	3,05%	3,00%	2,84%	2,51%	2,13%	2,12%	1,84%

Tingkat inflasi Kabupaten Hulu Sungai Utara pada triwulan III tahun 2024 masih terkendali dan tercatat deplasi sebesar 0,55% (mtm), lebih rendah dari rata-rata Kalimantan Selatan yang inflasi sebesar 0,07% dan rata-rata nasional sebesar 1,84%. Capaian ini dipengaruhi oleh penurunan harga pada kelompok bahan makanan yaitu daging ayam ras (-0.4823%), cabai rawit (-0,4446%) dan gula pasir (-0.0627%). Penurunan harga daging ayam dan cabai rawit menjadi faktor utama deflasi ini, yang terjadi seiring dengan normalisasi harga pakan ternak serta peningkatan pasokan cabai rawit pasca panen di sentra produksi.

Risiko deplasi Kabupaten Hulu Sungai Utara yang perlu diwaspadai ke depannya

1. Menurunnya pendapatan produsen (peternak dan petani)
 2. Stabilitas inflasi yang terlalu rendah bisa mengindikasikan lemahnya daya beli konsumen, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.
 1. Penurunan daya beli masyarakat.
 2. Harga bahan pangan pokok yang fluktuatif.
 3. Memasuki masa panen raya yang mempengaruhi jumlah ketersediaan pangan yang meningkat/melimpah sehingga berdampak pada harga yang cenderung mengalami penurunan.
 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.
 1. Pengendalian harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat melalui monitoring dan sidak ke Pasar Amuntai dan Distribusi untuk mengetahui kondisi harga bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat yang dilaksanakan setiap hari kamis setiap minggunya.
 2. Stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui operasi pasar murah.
 3. Melaksanakan survey harian dan mingguan ditingkat konsumen di Pasar Besar Kabupaten dan Pasar Kecamatan
 4. Menyusun prognosa neraca pangan strategis perminggu untuk memperoleh data ketersediaan pangan strategis
 5. Mengoptimalkan kelancaran distribusi memlalui integarsi bersama antara pemerintah daerah, instansi terkait dan kepolisian

Melaksanakan penyaluran Bantuan Pangan (Banpang) berupa beras ke Kecamatan/Desa

6.

di Kab. HSU.

7. BULOG bekerja sama dengan pedagang beras baik yang ada di pasar induk Amuntai maupun di pasar Alabio untuk menjual beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.
8. Pemberian bantuan benih padi, cabe dan bibit ternak serta melakukan percepatan tanam padi dengan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dan percepatan tanam.
9. Menyalurkan bantuan sarana dan prasarana perikanan.
10. Melakukan pembersihan sungai dalam rangka kelancaran pendistribusian kebutuhan pokok sampai ke masyarakat.
11. Melaksanakan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara bersama TPID dan Satgas Pangan

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Diharapkan bahwa kegiatan pengendalian inflasi merupakan kegiatan yang berkesinambungan dengan rencana pencapaian yang terukur;
2. Belum adanya komunikasi yang intensif maupun kerjasama dengan daerah produsen/penghasil bahan pokok sehingga kesulitan dalam mengambil kebijakan ketika terjadi kelangkaan maupun over supply suatu komoditas.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Perlunya peningkatan stok atas komoditas-komoditas yang ikut andil terhadap terjadinya inflasi dan perlunya penyusunan pemetaan komoditas di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Perlunya Pemda bersama stakeholder untuk melanjutkan kegiatan sidak ke pasar. Hal ini perlu untuk memastikan komoditas subsidi pemerintah tidak dijual pedagang melebihi HET, serta pemda dapat mengetahui pergerakan harga untuk dapat diantisipasi inflasi yang terjadi.
3. Mendorong BUMD, Koperasi maupun BUMDes untuk membangun dan mengoptimalkan fasilitas pergudangan / coldstorage yang dapat dipergunakan untuk membeli komoditas yang mengalami penurunan harga untuk kemudian disalurkan harga sedang naik.
4. Memperkuat Koordinasi antara TPID Kab. Hulu Sungai Utara, TPID Provinsi Kalimantan Selatan dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPID) dalam rangka mengidentifikasi wilayah yang berpotensi surplus dan defisit dan mendorong kerjasama antara daerah dalam pengendalian inflasi.